



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jl. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP : 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10010

Nomor : **B-39** /Bua.3/KU.01/11/2018

6 November 2018

Lampiran : 1 (satu) bundel

Sifat : Penting

Hai : Pembukaan Rekening Lainnya (Rekening Perkara) Satker Baru

Kepada Yth.

Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tingkat Pertama

Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 182/PMK.05/2017 tanggal 29 November 2017 tentang Pengelolaan Rekening Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1256/SEK/KU.01/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Biaya Operasional Satuan Kerja Baru Tahun 2018 serta demi kelancaran dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, maka perlu segera membuka rekening untuk menampung biaya perkara dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengajuan Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya (Rekening Perkara) satker baru ke KPPN dilakukan oleh satker induknya (format terlampir);
2. Apabila satker baru terlanjur mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya di KPPN dan telah mendapatkan persetujuan pembukaan rekening dari KPPN maka tetap diwajibkan melaporkan saldo rekening akhir bulan tersebut melalui satker induknya ke KPPN;
3. Dalam pengajuan persetujuan pembukaan rekening tersebut agar dijelaskan tujuan pembukaan rekening tersebut untuk menampung biaya perkara yang ada pada satker baru sehingga nama rekening yang diajukan menyebutkan nama satker baru tersebut;
4. Setelah mendapatkan persetujuan pembukaan rekening tersebut, satker baru membuka rekening pada bank yang diajukan pada saat permohonan persetujuan pembukaan rekening dengan nama rekening yang telah ditentukan oleh KPPN dengan perlakuan Jasa Giro menggunakan sistem *Treasury National Polling* (TNP);
5. Satker baru wajib melaporkan saldo bulanan kepada KPPN melalui satker induknya;
6. Apabila satker baru sudah mendapatkan DIPA di tahun 2019 maka satker induk segera mengajukan perubahan kode satker dan kode kppn terhadap rekening tersebut sehingga pelaporan saldo rekening tersebut menjadi kewajiban satker yang baru ;
7. Satuan kerja yang baru belum diperbolehkan membuka rekening untuk bendahara karena belum ada DIPA Satker;

8. Satker induk melakukan pelaporan dan updating data rekening yang telah dibuka satker baru tersebut pada pada aplikasi KOMDANAS;
9. Apabila ada kendala dalam permohonan persetujuan pembukaan rekening agar segera berkoordinasi dengan KPPN setempat;

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan MA RI;
3. Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Peradilan di Lingkungan MA RI;
4. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Peradilan di Lingkungan MA RI;
5. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Peradilan di Lingkungan MA RI;

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING LAINNYA SATKER BARU

KOP SURAT SATKER

Nomor : November 2018
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
di

.....

Assalamualaikum Wr.Wb.

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja dan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat pencari keadilan untuk mempermudah penyetoran biaya panjar perkara **pada satker baru di satker**, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya pada Bankuntuk keperluan biaya perkara (menampung uang titipan panjar biaya perkara) dari Pihak ke III (Pihak yang berperkara / masyarakat pencari keadilan) dengan uraian sebagai berikut :

1. Jenis Rekening : Rekening Lainnya
2. Bank :
3. Tujuan Penggunaan : untuk menampung biaya perkara pada satuan kerja Pengadilan
4. Sumber Dana : Berasal dari Pihak ke III yaitu masyarakat pencari keadilan/Penggugat/Pemohon sebagai setoran panjar Biaya Perkara yang akan ditetapkan oleh Pengadilan.....
5. Perlakuan Jasa Giro : Masuk dalam program *Treasury National Polling* (TNP)
6. Mekanisme Penyaluran Dana : Dana yang telah disetor ke rekening akan dipergunakan untuk biaya panggilan para pihak, biaya proses perkara, biaya pendaftaran, biaya redaksi dan materai. Apabila terdapat sisa atas panjar tersebut, sisa panjar akan dikembalikan kepada masyarakat pencari keadilan

Apabila permohonan ijin pembukaan rekening ini disetujui, maka kami menyatakan kesanggupan untuk melaporkan pembukaan rekening, menyampaikan daftar saldo rekening setiap bulan dan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut diatas.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalam
Kuasa Pengguna Anggaran / Ketua
Pengadilan,

.....

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi MA RI
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan...
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi....

B. FORMAT SURAT KUASA

KOP SURAT SATKER

SURAT KUASA

Nomor.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran/Ketua Pengadilan
Pada : Pengadilan

Dengan ini memberi kuasa kepada :

- 1) Direktur Jenderal Perbendaharaan Cq. Direktur Pengelola Kas Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat dan
- 2) Kepala kantor Pelayanan Perbendaharaan Negaraselaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah.

Untuk bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja atas rekening pemerintah pusat pada Bank untuk satker Pengadilan, yaitu :

- 1) Memperoleh segala informasi mengenai rekening;
- 2) Melakukan blokir atas rekening;
- 3) Menutup rekening dan memindahbukukan saldo ke rekening kas umum Negara.

Surat Kuasa ini berlaku selama diperlukan oleh Kuasa Bendahara Umum Pusat dan Kuasa Bendahara Umum di Daerah sebagaimana dimaksud diatas.

Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran,
Materai 6 Ribu _____

Nama.....
NIP.....